

**IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KEMENDAGRI, POLRI,
DAN KEJAGUNG DALAM PENANGANAN INDIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI DI
PEMERINTAHAN DAERAH**

TESIS



Nama : Cipto Dwi Leksana,S.Tr.K

NIM : 20301700013

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2019**

**IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KEMENDAGRI, POLRI,
DAN KEJAGUNG DALAM PENANGANAN INDIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI DI
PEMERINTAHAN DAERAH**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH

Nama : Cipto Dwi Leksana,S.Tr.K
NIM : 20301700013
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2019**


**IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KEMENDAGRI,
POLRI, DAN KEJAGUNG DALAM PENANGANAN INDIKASI TINDAK
PIDANA KORUPSI DI PEMERINTAHAN DAERAH**

**LEMBAR PERSETUJUAN
Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

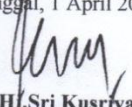
OLEH:

Nama : Cipto Dwi Leksana, S.Tr.K
NIM : 20301700013
Program Studi : Magister Ilmu Hukum



Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal, 1 April 2019


Dr.H.Umar Ma'ruf,SH.,Sp.N.,M.Hum
NIDN: 06-1702-6801

Pembimbing II,
Tanggal, 1 April 2019


Dr.H.Sri Kusriyah,SH.,M.Hum
NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. H. Umar Ma'ruf, SH., Sp.N., M.Hum
NIDN: 06-1702-6801

**IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KEMENDAGRI,
POLRI, DAN KEJAGUNG DALAM PENANGANAN INDIKASI TINDAK
PIDANA KORUPSI DI PEMERINTAHAN DAERAH**

TESIS


Cipto Dwi Leksana, S.Tr.K

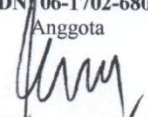
NIM : 20301700013
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

**Telah di pertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal, 22 Maret 2019
Dan dinyatakan LULUS**



Tim Penguji
Ketua,


Dr. Rakhmat Bowo Suharto, SH., MH.
NIDN. 06 2704 6601
Anggota


Dr. H. Umar Ma'ruf, SH., Sp.N., M. Hum
NIDN: 06-1702-6801
Anggota


Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH., M. Hum
NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M. Hum
NIDN: 06-1702-6801

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yng bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Cipto Dwi Leksana**

NIM : 20301700013

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yng berjudul :

IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KEMENDAGRI, POLRI, DAN KEJAGUNG DALAM PENANGANAN INDIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI DI PEMERINTAHAN DAERAH

Adlh benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yng berlaku.



2019

Cipto Dwi Leksana

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Cipto Dwi Leksana**
NIM : 20301700013
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Alamat Asal : Dusun Nganten RT 2 RW 3 Sokosari Soko Tuban
No. HP/Email : 082231199744/akbpcipto@gmail.com

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~
dengan judul :

**IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KEMENDAGRI,
POLRI, DAN KEJAGUNG DALAM PENANGANAN INDIKASI TINDAK
PIDANA KORUPSI DI PEMERINTAHAN DAERAH**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiatisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2019


Cipto Dwi Leksana

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Penelitian dengan judul implementasi perjanjian kerja sama antara kemendagri, polri dan kejakung dalam penanganan indikasi tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah sebagai sebuah gebrakan produk hukum dalam pemenuhan konsentrasi memperbaiki jalannya birokrasi di tubuh pemerintahan daerah. Berdasarkan hal tersebut, penulis mempunyai tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut: Untuk mengetahui dan menganalisa implementasi perjanjian kerjasama antara Kemendagri, Polri, dan Kejaksaan dalam penanganan indikasi tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah, Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Kemendagri, Polri, dan Kejaksaan dalam penanganan indikasi tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah, Untuk mengetahui dan menganalisa solusi dalam mengatasi hambatan pada pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Kemendagri, Polri, dan Kejaksaan dalam penanganan indikasi tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dimana data yang digunakan adalah data primer, data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber wawancara dan observasi lapangan kemudian data sekunder bersumber dari studi pustaka dan studi dokumen. Analisa data penelitian ini menggunakan data secara kualitatif. Permasalahan penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori penegakan hukum, teori keadilan, dan teori pengawasan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui: (1) Untuk mengetahui dan menganalisa implementasi perjanjian kerjasama antara Kemendagri, Polri, dan Kejaksaan dalam penanganan indikasi tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah dengan melihat praktek APIP dan APH dalam melaksanakan perjanjian tersebut. (2) Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dimana APIP dan APH memiliki peran tersendiri dan menghadapi hambatan yang berbeda pula. (3) Untuk mengetahui dan menganalisa solusi dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut bahwa setiap ada hambatan dari sebuah pelaksanaan penegakan hukum pasti ada solusi untuk melancarkan pelaksanaannya dan bisa memberikan keadilan yang seadil-adilnya dalam penerapan sebuah hukum.

Kata Kunci: Perjanjian Kerja Sama, Tindak Pidana Korupsi, Pemerintahan Daerah.

ABSTRACT

The research with the title of implementation of the cooperation agreement between the Ministry of Home Affairs, Indonesian National Police and the Attorney General in handling indications of corruption in local governments as a breakthrough in legal products in fulfilling the concentration of improving the course of bureaucracy in regional government. Based on this, the author has a purpose in this study as follows: To find out and analyze the implementation of cooperation agreements between the Ministry of Home Affairs, National Police, and the Attorney General in handling indications of corruption in local governments, To know and analyze the obstacles faced in implementing cooperation agreements between the Ministry of Home Affairs , the National Police, and the Attorney General in handling indications of corruption in regional governments, To find out and analyze solutions in overcoming obstacles to the implementation of cooperation agreements between the Ministry of Home Affairs, the National Police, and the Attorney General in handling indications of corruption in regional governments.

The approach method used in this study is a sociological juridical approach. The specifications in this study are descriptive analytical, where the data used is primary data, secondary data. Primary data is obtained from interview sources and field observations, then secondary data is sourced from literature studies and document studies. Analysis of this research data uses data qualitatively. The problem of this research was analyzed using law enforcement theory, justice theory, and supervisory theory.

Based on the results of research and discussion known: (1) To find out and analyze the implementation of cooperation agreements between the Ministry of Home Affairs, National Police, and the Attorney General in handling indications of corruption in local governments by seeing the practice of Government Internal Supervisory Apparatus and Law Enforcement Officials in implementing the agreement, (2) To find out and analyze the obstacles faced in implementing this cooperation agreement where Government Internal Supervisory Apparatus and Law Enforcement Officials have their own roles and face different obstacles, (3) To find out and analyze solutions in overcoming obstacles in the implementation of the cooperation agreement that every obstacle from a law enforcement implementation there must be a solution to facilitate its implementation and be able to provide fair justice in the application of a law.

Keywords: Cooperation Agreements, Corruption, Regional Government.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbilalamin, Segala Puji tercurahkan kepada Allah Subhanahu Wataala yang telah melimpahkan Rahmat dan Taufik serta Hidayahnya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: **IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KEMENDAGRI, POLRI, DAN KEJAGUNG DALAM PENANGANAN INDIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI DI PEMERINTAHAN DAERAH**, dapat diselesaikan tepat waktu.

Pengambilan judul tersebut di atas dilatarbelakangi dari apa yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (1) setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan Pasal 28H Ayat (2) dimana setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan yang mana kedua Pasal tersebut saling berhubungan antara penegakan hukum yang seadil-adilnya dan kebermanfaatan dalam pembangunan daerah dalam perjanjian kerja sama antara Kemendagri, Polri, dan Kejagung dalam penanganan indikasi tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah. Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas- tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Ilmu Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih mendalam tentang Bagaimana implementasi perjanjian kerjasama antara Kemendagri, Polri, dan Kejagung dalam penanganan indikasi tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah?, Apa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Kemendagri, Polri, dan Kejagung dalam

penanganan indikasi tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah?, Bagaimana solusi dalam mengatasi hambatan pada pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut?.

Penulis menyadari penyusunan bahwa tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini diucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Ir. Prabowo Setiyawan, MT, PhD., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Umar Ma'ruf, SH., Sp.N.,M.Hum selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan sekaligus Pembimbing I yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
4. Dr. Hj.Sri Kusriyah,SH.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
5. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
6. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.

Semarang, Maret 2019

Penulis

Cipto Dwi Leksana